

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu E. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Cetakan Pertama. Calpulis.
- Andriyan, Dody N. 23 Februari 2012. *Mengenai Penghapusan Kredit Macet*. Diakses pada 3 Juni 2017. <http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2012/02/mengenai-penghapusan-kredit-macet.html>
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Edisi Indonesia. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Modul Pemeriksaan Pajak Industri Perbankan Konvensional*. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
- Herawati, Tuti. 2013. *Pengaruh Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu terhadap Pajak Penghasilan Terhutang*. STAR-Study & Accounting Research Vol X, No.3. ISSN: 1693-4482
- Idris, Muhammad. 19 Januari 2016. *Ini Cara OJK Awasi BPR dan Lembaga Keuangan Masyarakat*. Diakses pada 3 Juni 2017. <http://katadata.co.id/berita/2016/11/09/ditjen-pajak-50-persen-bpr-tak-lapor-pajak-tahun-lalu>
- Kesit, Bambang. 2010. *Modul: Teknik Rekonsiliasi Fiskal untuk Menghitung PPh Badan*. Prodi Akuntansi-FEUI
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Keduabelas. Penerbit Erlangga
- Mappedeceng, Rico. 2016. "Metode Akuntansi pada Perusahaan-Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia: Suatu Kajian". Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. *Eksis* Vol.7 No.2
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*-Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Margono. 2014. "Implikasi Perpajakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Makalah Program Seleksi dan Penilaian Program Penghargaan Kinerja Pegawai pada Jabatan *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

- Pujianto, Andi. 2012. "Pencatatan Penghapusan Piutang dalam Akuntansi". *Akuntansi Pendidik*. Diakses pada 6 Juli 2017. <http://www.akuntansi-pendidik.com/2012/11/pencatatan-penghapusan-piutang-dalam-akuntansi.html>
- Pujianto, Andi. 2016. *Beban Piutang Taktertagih*. Observation & Research of Taxation.Ortax. Diakses pada 18 April 2017. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=83>
- Repubik Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Repubik Indonesia. 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2013 Tentang Pemeriksaan
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiab Nomor 81/PMK.03/2009 tentangPembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besaran Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 219/PMK.011/2012 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/PJOK/03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Rinanti, Risna. 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)”. Tesis: Magister Manajemen Universitas Diponegoro
- Setyowati, Desy. 2016. *Pemerintah Kejar Setoran, Kasus Banding Wajib Pajak Melonjak*. Katadata. Diakses pada 18 April 2017. <http://katadata.co.id/berita/2016/02/23/pemerintah-kejar-setoran-kasus-banding-wajib-pajak-melonjak>
- Taufiqurrakhman, Muhammad, dan Iman Santoso. 2013. “Analisis Perlakuan Perpajakan atas Piutang Tak-Tertagih yang Dihapusbukukan pada Industri Perbankan”. Artikel jurnal Program Studi Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
- Thertina, Martha R. 9 November 2016. Katadata. *50 Persen Bank Perkreditan Rakyat Tak Lapor Pajak 2015*. Diakses pada 3 Juni 2017. <http://katadata.co.id/berita/2016/11/09/ditjen-pajak-50-persen-bpr-tak-lapor-pajak-tahun-lalu>
- Wijaya, Erikson. 2016. *Rekonsiliasi Fiskal Untuk Piutang Tidak Tertagih*. Portal isu kebijakan atau regulasi perpajakan. Diakes pada 17 April 2017. <http://punditax.com/rekonsiliasi-fiskal-untuk-piutang-tidak-tertagih/>